**PROGRAM KERJA PEMERINTAH**

**ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN**

**Oleh Wiwik Widayati**

*Abstract*

*Economic issue to be central issues in political compain because economy development has become leverage point to realize the prosperity a country.SBY administration decides many social economic policies in order to overcome social and economic problem. This will be realize on the government programmes, short term government programmes and long term government programmes. This programmes will be challenge by government to realize.*

*Keyword: government, programs and economic*

**PENDAHULUAN**

Reformasi tahun 1997 / 1998 adalah titik awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dimana hak- hak dan suara rakyat mendapat porsi yang cukup besar melalui pelaksanaan demokrasi. Implementasi dari pengakuan suara rakyat bisa dilihat pada penyelenggaraan pemilihan presiden, kepala daerah dan calon legislatif dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat bahkan pada pemilihan calon legeslatif tahun 2009, rakyat diberi kesempatan untuk memilih figure calon legislatif yang diajukan oleh masing- masing partai. Karena system pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara hierarkhi yang terdiri dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten sampai dengan desa sebagai daerah otonom terkecil, dimana kepala wilayah dari masing- masing tingkatan pemerintahan tersebut juga dituntut untuk dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga kondisi dilapangan akan terjadi susul menyusul pemilihan kepala daerah dalam satu wilayah maupun antar wilayah dan rakyat selalu disibukkan dengan kegiatan pemilihahan kepala pemerintahan. Untuk masyarakat Jawa Tengah pemilihan Gubernur baru saja selesai kemudian disusul dengan pemilihan calon legislatif, pemilihan Presiden bahkan dibeberapa daerah juga mulai melakukan persiapan pemilihan Bupati sampai dengan Kepala Desa . Kondisi ini menjadikan rakyat seperti sang raja yang selalu ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, keinginan dan suara rakyat didengar, kepentingannya selalu diperhatikan oleh sang calon, berbagai janji politik diucapkan terutama yang berkait dengan pengangkatan kesejahteraan masyarakat bahkan masing- masing calon berlomba untuk memberikan janji manis politik.

Karena pemilihan presiden maupun kepala daerah dilakukan secara langsung maka figure masing- masing calon sangat menentukan dalam memikat hati rakyat, mereka saling berlomba mengobral janji dan program terutama program- program yang langsung menyentuh nurani kesejahteraan. Sehubungan dengan hal tersebut issu ekonomi merupakan issue yang selalu diangkat oleh calon kepala daerah dan presiden. Demikian juga dengan rakyat berdasar berbagai survei dan pengamatan umum menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi perhatian utama pemilih dalam menilai pemerintah khususnya Presiden. Kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan kemiskinan menjadi indikator keberhasilan ekonomi dari suatu rezim.Hal ini bisa kita lihat pada pemilihan Presiden SBY periode kedua dan Megawati dimana pemilih menentukan pilihan berdasar kinerja ekonomi terutama yang menyangkut kehidupan pemilih. Walaupun kinerja ekonomi makro pada pemerintahan Presiden Megawati sebenarnya tidak buruk yaitu dengan pertumbuhan ekonomi moderat, Inflasi dan tingkat suku bunga relative rendah namun tingkat pengangguran dan kemiskinan relative tinggi dan pemililih menilai Presiden Megawati pada saat itu tidak dapat memenuhi janjinya untuk memperbaiki taraf hidup rakyat umum, kemudian rakyat berpaling pada SBY karena popularitas pribadi dan harapan besar untuk bisa mensejahterakan rakyat dan bukan atas pertimbangan kinerja. Demikian pula pada pemilihan Presiden SBY kedua dimana kinerja ekonomi makro cukup baik jika dilihat dari angka pertumbuhan walaupun tingkat inflasi cukup tinggi, angka pengangguran dan kemiskinnan masih tinggi juga namun krisis keuangan global di Amerika yang memporak porandakan ekonomi dibeberapa negara ternyata pemerintah mampu mengurangi pengaruh buruk dari krisis keuangan global melalui berbagai kebijakan diataranya dengan penguatan daya beli masyarakat, stimulus fiskal maupun stimulus moneter.

Jika dalam menarik simpati pemilih para calon menggunakan berbagai janji untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat maka setelah terpilihpun rakyat hendaknya berperan sebagai lembaga pengawas untuk menagih janji yang telah mereka ucapkan sebelumnya. Langkah awal untuk memenuhi janji rakyat muncul tradisi program 100 hari pemerintahan pertama dimana ujian pertama bagi pemerintah adalah tingkat pencapaian program seratus harian tersebut.

**PROGRAM KERJA SERATUS HARI**

Semenjak era reformasi tampaknya sudah menjadi tradisi bahwa pemerintah yang baru dilantik akan mencanangkan program seratus hari, walaupun program pembangunan amat pendek ini tidak dikenal dalam system perencanaan pembangunan di Indonesia, dimana proses perencanaannyapun tidak dilakukan secara sistemik dan lebih bersifat untuk menunjukkan kinerja tahap awal pemerintahan yang baru dan sekaligus dapat berfungsi sebagai pengawasan bagi masyarakat apakah sejauhmana janji- janji politik pada saat kampanye hendak dilaksanakan.

Pemerintahan hasil pemilu yang baru lalu juga menyusun program seratus hari yang akan selesai sebelum bulan Febuari 2010. Sementara program lima tahunan akan diadopsi oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana aksi program seratus hari tersebut adalah:

**Rencana Aksi Program Seratus Har**i

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | TANGGAL | PROGRAM |
| 1. | Des 2009 | Perpres pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme. |
| 2. | Des 2009 | Penyelesaian Perpres Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. |
| 3. | Des 2009 | Menangani TKI bermasalah di sejumlah penampungan |
| 4. | Jan 2010 | Penyelesaaian UU (bersama DPR) dan Perpres tentang Tipikor. |
| 5. | Jan 2010 | Peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk miskin dalam system jaminan kesehatan. |
| 6. | Jan 2010 | Pembentukan Pusat kewirausahaan termasuk teknopreneur bagi dosen dan mahasiswa melalui kerjasama institusi pendidikan termasuk dunia usaha |
| 7. | Jan 2010 | Akses beasiswa bagi pendidikan di perguruan tinggi negeri untuk 20.000 siswa lulusan sekolah menengah yang kurang mampu untuk tahun ajaran 2010-2011 |
| 8. | Jan 2010 | Sarana air minum untuk 1.379 lokasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah |
| 9. | Jan 2010 | Pembatahan harga eceran tertinggi bagi obat bermerek generik |
| 10. | Jan 2010 | Percepatan proses memulai usaha dari 90 harimenjadi 40 hari. |
| 11. | Jan 2010 | Pelayanan paspor yang mudah dan transparan dari tujuh hari menjadi empat hari |
| 12. | Feb 2010 | Perpres tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000.watt. |
| 13. | Feb 2010 | Pengaturan jaminan pasokan energy. |
| 14. | Feb 2010 | Perpres tentang pertanian tanaman pangan skala luas (food estate) dan pencanangan food estate di Meraoke. |
| 15. | Feb 2010 | Melanjutkan program keluarga harapan, menambah peserta dari 75.000. menjadi 810.000. |
| 16. | Feb 2010 | Penyediaan internet bagi 17.500. sekolah dan penguatan kemampuan 30.000.kepala sekolah dan pengurus sekolah. |
| 17. | Feb 2010 | Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online. |
| 18. | Feb 2010 | Insentif bagi pemanfaatan energi terbarukan |
| 19. | Feb 2010 | Penerapan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik. |
| 20. | Feb 2010 | Operasi layanan pelabuhan dan kepabeanan 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. |
| 21. | Feb 2010 | Penyusunan cetak biru transportasi mutimoda yang sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional. |
| 22. | 1 tahun | Peraturan Menteri Keuangan tentang subsidi pertanian dan perikanan yang terpadu. |
| 23 | 1 tahun | Penyusunan RUU tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum |
| 24. | Nov 2009 | Penyusunan satuan tugas *citizen service* di luar negeri. |

Sumber: Kompas, 10 November 2009

Rencana aksi program seratus hari ini dibuat berdasar program masing- masing dari sektor yang ada pada tiga Menteri Koordinator, yaitu untuk bidang ekonomi ditetapkan 19 program yang diikuti dengan 60 aksi berbagai langkah dan tindak lanjut. Di bidang politik, hukum dan keamanan terdapat 10 program dengan 43 rencana aksi, adapun untuk bidang kesejahteraan rakyat pemerintah menetapkan 16 program diikuti dengan 25 rencana aksi.

Jika pemerintah mempunyai program aksi seratus hari , kemudian tak kalah serunya masing- masing menteri juga menyusun rencana program seratus hari yang jika dikaji program- program yang mereka lontarkan cukup bagus secara konseptual namun sekaligus menjadi tantangan bagi mereka apakah dengan waktu yang relative singkat program tersebut dapat dilaksanakan .

Menteri Pertanian mengagendakan tugas pertama yang akan dilakukan adalah audit lahan pertanian dimana luas lahan baku pertanian sawah di Indonesia masih simpang siur karena masing- masing departemen punya versi data yang berbeda. Adanya data tentang luas lahan pertanian yang valid sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lain misalnya proyeksi tingkat produksi padi dalam negeri yang selanjutnya juga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagaimana memenuhi konsumsi beras masyarakat. Sementara ini disebut luas lahan sawah tujuh juta ha sementara ada sumber lain yang menyebut tingkat alih fungsi lahan sawah ke non pertanian mencapai 100 ribu ha per tahun. Selain audit lahan Menteri Pertanian juga menjanjikan akan menambah lahan garapan petani yang selama ini rata- rata luas garapan per keluarga petani hanya 0,3 ha, dengan luas lahan yang sempit petani selalu berada dalam perangkap kemiskinan oleh karena itu perlu peningkatan kesejahteraan petani melalui penambahan luas lahan garapan dan peningkatan status penguasaan lahan menjadi kepemilikan. Sudah sejak tahun 1960 dengan lahirnya UUPA pemerintah memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, sehubungan dengan hal tersebut yang harus adalah melakukan pengaturan tentang penguasaan lahan pertanian yaitu dengan penetapan batas minimal 2 ha dan batasan maksimal penguasaan lahan pertanian tiap keluarga petani dengan mmpertimbangkan jumlah anggota keluarga, jenis lahan dan tingkat kepadatan suatu wilayah. Peraturan perundangan tersebut hampir setengah abad yang lalu sudah sangat arif memikirkan bagaimana mengangkat kesejahteraan petani namun implementasinya sama sekali tidak ada walaupun peraturan perundangan tersebut hingga sekarang masih berlaku. Yang menjadi pertanyaan kita apakah dengan waktu 3 bulan pemerintah mampu untuk mengimplementasikan program tersebut yang terkait dengan bidang- bidang lain, kita tidak berahap program yang sangat baik tersebut hanya program mimpi yang hanya menarik simpati masyarakat khususnya petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya dengan meningkatkan luas dan status lahan garapan tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian, selama ini produk pertanian yang dijual atau dieksport masih dalam bentuk komoditas primer yang tidak memberi nilai tambah dan menumbuhkan industri pengolahan. Oleh karena itu program kedepan Indonesia harus memiliki industri pasca panen yang unggul yang mengolah produk pertanian lokal supaya dapat bersaing dan menciptakan nilai tambah.

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai posisi yang saangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Kabinet SBY kedua departemen ini mentargetkan pertumbuhan industry dalam lima tahun mencapai 6 %, target ini bisa dicapai dengan menguatkan pembangunan infra struktur, ketahanan pangan dan energi serta komunikasi dan birokrasi. Industri unggulan yang bisaa dimaksimalkan dalam mewujudkan target tersebut adalah industry tekstil, elektronik, industri logam dan industri kreatif yang berbasis budaya.

Dalam seratus hari pertama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan menginventarisasi persoalan energy dan sumber daya mineral serta tantangan yang dihadapi. Prioritas kerja Departemen ESDM adalah meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun untuk mewujudkan tujuan tersebut terkendala karena selama ini Indonesia masih tergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan minyak siap guna atau minyak jadi, sehubunngan dengan kondisi tersebut maka perlu segera dilakukan diversifikasi dan konservasi untuk mengatasi krisis energy sekarang.

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh Indonesia adalah tingginya angka pengangguran walaupun pertumbuhan ekonomi yang dicapai cukup baik. Program seratus hari Kementrian Tenaga Kerja adalah melakukan komunikasi triparteit yang intensif demi terciptanya iklim yang kondusif pada dunia usaha, penciptaan lapangan kerja baru yang memenuhi kualitas hidup pekerja dan optimalisasi pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan koordinasi antara Departemen Pendidikan, Departemen Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan daan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Prioritas program yang lain adalah dengan memacu kompetensi pekerja agar memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga perlu mengoptimalkan Balai Latihan Kerja sesuai dengan standar kompetitif di pasar tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah tenaga kerja hendaknya pemerintah menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu dari kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang dan proporsional, disamping perlu perbaikan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah minimum juga harus diikuti dengan tingkat produktifitas yang memadai dari tenaga kerja tersebut, justru inilah yang menjadi tantangan bagi Menteri Tenaga Kerja untuk meningkatkan produktifitas kerja dari tenaga kerja Indonesia mengingat tingkat produktifitas tenaga kerja Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara lain yaitu Malaysia, Korea dan bererapa negara Asia.

Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai tiga program prioritas yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan fasilitas infrastruktur di daerah pesisir, pengelolaan pulau- pulau dan menyelesaikan penamaan pulau. Lepasnya beberapa pulau dari kekuasaan Negara kita salah satunya disebabkan oleh pengelolaan terhadap pulau- pulau kecil yang tidak baik terutama pulau- pulau yang berada pada garis luar batas wilayah Indonesia. Nampaknya pekerjaan memberi nama terhadap pulau- pulau kecil adalah pekerjaan yang sangat sederhana namun hendaknya pemberian nama pulau tersebut juga harus diikuti dengan pemetaan ulang atas pulau tersebut mengingat Indonesia mempunyai 17.000 pulau kecil yang pengelolaannya menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah.

**PROGRAM PRIORITAS**

Disamping puluhan program seratus hari tersebut pemerintah juga memiliki beberapa program yang menjadi prioritas, program itu antara lain:

1. Pemberantasan mafia hukum.
2. Revitalisasi industry pertahanan.
3. Revitalisasi listrik.
4. Produksi dan ketahanan pangan.
5. Revitalisasi pabrik gula.
6. Membenahi keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang.
7. Peningkatan kemampuan infrastruktur.
8. Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR)
9. Mobilisasi pembiayaan.
10. Meningkatkan investasi di luar APBN.
11. Koordinasi pusat dan daerah

Program yang disusun pemerintah hingga tahun 2010 berkonsentrasi memangkas berbagai hambatan ( *bottlenecking* ) yang selama ini menghalangi atau menghambat pertumbuhan investasi maupun ekonomi, misalnya dalam aspek regulasi terjadi benturan antara tata ruang dan tumpang tindih perijinan. Asumsi pertumbuhan ekonomi masih dalam tingkat moderat yaitu berkisar 5,5 % mengingat konsentrasi pemerintah adalah upaya menerobos hambatan dalam pembangunan perekonomian. Tahap selanjutnya setelah sumbatan ekonomi dapat diatasi maka pada tahun 2011 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan bergerak jauh lebih cepat, hal ini sejalan dengan makin lancarnya investasi yang masuk, jadi setelah tahun 2011 akan terjadi akselerasai atau percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan berbagai program tersebut pemerintah dihadapkan pada permasalahan besar berupa issu pemanasan global yang melanda dunia, dimana sektor pertanian khususnya pangan perupakan sektor yang paling terpukul atas perubahan iklim yang berakibat pada penurunan produksi padi karena terjadinya perubahan pola curah hujan serta anomaly iklim akan menambah luas lahan sawah yang terkena kekeringan. Oleh karena itu kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk mewujudkan program ketahanan pangan masyarakat.

Terbangunnya ketahanan pangan rakyat sebenarnya bukan program baru dari pemerintah karena pemerintah sebelumnya juga sudah mencanangkan terwujudnya ketahanan pangan rakyat dan pada pemerintahan Orde Baru kita mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri bahkan pembangunan pertanian sudah terintegrasi secara baik dengan kebijakan ekonomi makro (Bustanul Arifin: 2004 ;1) dan pembangunan sector pertanian tumbuh rata-rata 5,7 persen pada periode 1978- 1986 yaitu angka pertumbuhan yang cukup baik. Keberhasilan revolusi hijau pemerintah Orde Baru mampu meningkatkan produktifitas pangan sampai 5,6 %. Namun keberhasilan tersebut tidak berlanjut pada pemerintahan berikutnya bahkan kini angka pertumbuhan pembangunan pertanian dibawah 3,4 %. Untuk itu menjadi tantangan bagi pemerintah SBY untuk mengembalikan kejayaan sector pertanian sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto dan penyedia lapangan kerja yang cukup besar karena hingga kini masih 60 % penduduk Indonesia hidup di sector pertanian. Di bidang pangan yang lebih penting tidak hanya terciptanya ketahanan pangan tapi ketahanan pangan yang berbasis pada kemandirian sehingga akan tercipta kedaulatan pangan masyarakat, kita tidak lagi bergantung pada pasokan pangan dari Negara lain karena hal ini akan menbentuk ketahanan pangan yang rapuh. Dalam menghadapi perubahan iklim tersebut Departemen Pertanian telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkirakan lahan sawah yang mengalami kekeringan mencapai 3,1 – 7,8 % dan mengalami puso meningkat dari 0,004 -0,41 % menjadi 0,04 – 187 % demikian juga pada musim basah saat terjadi la Nina akan mengancam produksi padi juga diperkirakan terjadi kenaikan luas lahan yang terkena banjir dari 0,75 -2,68 % menjadi 0,97 – 2,99 % sehingga padi yang puso pun juga akan mengalami kenaikan dari 0,24-0,73 % menjadi 8,7 – 13,8 % ( Kompas , 9 Desember 2009) berdasar kajian tersebut akibat dari kekeringan dan banjir maka dapat diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi sebesar 365.463 ton gabah kering giling tiap tahun dan kecenderungan tersebut akan terus meningkat. Belum lagi terjadinya penurunan tingkat produksi sebagai dampak dari peningkatan suhu udara yang dapat men urunkan produktifditas padi, jagung dan kedelai sekitar 10 – 19,5 % selama 40 tahun ke depan . Akibat pemanasan global juga akan menaikkan air permukaan laut yang selanjutnya juga akan mengurangi luas lahan sawah hingga mencapai 292.000 ha hingga tahun 2050, pengurangan luas sawah akan terus berlanjut karena tingkat konversi lahan pertanian sawah ke penggunaan non pertanian juga cukup tinggi, sementara pemerintah masih setengah hati untuk mengimplementasikan kebijakan penngendalian konversi ini.

Dalam mendorong terwujudnya kemadirian pangan dapat dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi. Program adaptasi diantaranya program adaptasi tanaman pangan dan hortikultrura yang meliputi: *pertama.* perbaikan manajemen dan tehnologi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi, *kedua*, penyesuaian pola tanam terhadap dinamika iklim berdasar kalender tanam dinamis. *ketiga*, pengembangan tehnologi adaptif yaitu dengan menggunakan varietas bibit yang toleran terhadap kekeringan dan banjir. *keempat,* penerapan Undang- undang no. 41 tahun 2009 tentang perlindunngan lahan pertanian pangan berkelanjutan, *kelima,* percepatan reforma agrarian, *keenam* , pengembangan system perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim dengan pengembangan system peringatan dini. Sedangkan program mitigasi meliputi *pertama*, pemanfaatan lahan terlantar menjadi lahan pertanian sebenarnya peraturan perundangan telah mengatur dan melarang tindakan menelantarkan lahan pertanian yang berakibat pada pencabutan hak atas tanah. *kedua*, pemanfaatan limbah tanaman perkebunan sebagai pupuk organic dan bioenergi, sehingga kualitas kesuburan tanah unrtuk jangka panjang tetap terpelihara disamping juga akan menjaga ekosistem. *ketiga*, peremajaan dan diversifikasi jenis tanaman perkebunan, *keempat*, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.

Berbagai langkah dan upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan berbasis pada kemampuan produksi domestic dan mengembalikan keberhasilan swasembada pangan yang pernah dicapai pada tahun- tahun sebelumnya sehingga tidak hanya berhasil dalam swasembada beras tetapi juga swasembada kedelai, daging sapi dan gula.

Untuk jangka waktu lima tahun ke depan pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 % meskipun tahun ini masih berkisar 4,3 %. Target pengangguran terbuka sebesaar 5- 6 %, dimana pengangguran merupakan masalah ekonomi yang selalu muncul dan di Indonesia tingkat pengangguran cukup tinggi yaitu 8,1%, jumlah penduduk miskin juga akan diturunkan dari 14 % menjadi 8- 10 %. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah dan diperlukan sejumlah syarat, untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 % pada lima tahun mendatang maka diperlukan investasi senilai Rp.2.000 trilyun per tahun, dari kebutuhan besaran investasi tersebut kemampuan APBN bersifat terbatas yaitu hanya 20% atau sekitar Rp. 400.trilyun, oleh karena itu 80 % diharapkan partisipasi dari dunia usaha. Syarat lainnya adalah inflasi harus 4-6 % dan kurs rupiah yang stabil padsa angka Rp.9.250. – Rp.9.750. per dollar AS.

Syarat tersebut akan dapat terpenuhi dengan mewujudkan tujuh faktor penting yaitu:

1. Kepercaayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi
2. Iklim investasi yang kondusif. Perbaikan iklim investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perijinan, stabilitas makro ekonomi dan perbaikan sistem logistik nasional.
3. Dukungan ketahanan sosial. Dukungan ketahanan social harus dapat diwujudkan melalui pengentasan masyarakat dari kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan.
4. Infrastruktur yang memadai.
5. Jaminan pasokan energi.
6. Keamanan dan pertahanan.
7. Ketahanan pangan nasional.

Seperti telah disebut di atas bahwa program utama dari pemerintah adalah mengatasi berbagai sumbatan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, hukum dan politik sehingga target- target dari pembangunan akan tercapai. Untuk mendorong investasi dan mengatasi tingginya angka pengangguran di Indonesia pemerintah mengeluarkan bebebagai kebijakan baik melalui kebijakan fiskal , kebijakan moneter maupun kebijakan bidang lain, dengan kebijakan menurunkan suku bunga diharapkan akan menggerakkan sektor riil namun dalam kenyataannya SBI sudah diturunkan sedemikian rupa namun tidak terjadi peningkatan investasi yang signifikan bahkan beberapa investasi padat karya justru keluar dari Indonesia . Permasalahan umum yang dihadapi oleh dunia usaha adalah masalah perpajakan, perijinan tenaga kerja dan kepabeanan untuk itu perlu penataan baik dari aspek regulasi maupun implementasi agar sumbatan- sumbatan tersebut tidak terjadi, pemerintah perlu mengkaji ulang bererapa peraturan termasuk peraturan daerah yang justru menghambat investasi. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,5 % dan tahun 2011 naik menjadi 6,5 % akan tercapai jika implementasi program yang mendorong peningkatan investasi khususnya infra struktur akan berjalan baik.

Badan Koordinasi Penanaman modal memprediksi pertumbuhan investasi tahun 2010 berkisar 10- 15 % dimana naik turunnya angka investasi sangat sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah, walaupun angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah sekarang hanya 5 – 5,5 %. Menurut beberapa pengamat ekonomi angka perumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2010 masih terlalu rendah dan target yang bisa dicapai tanpa harus bekerja keras sama sekali dan menunjukkan tidak ada keinginan untuk kerja keras karena Indonsia mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi di atas 6 %.( Kompas, 14 Desember 2009) Namun tentu saja untuk mencapai angka pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut perlu pembangunan dan perbaikan infrastruktur termasuk penyediaan energy listrik yang cukup. Dengan tumbuhnya investasi baik investasi domestic maupun investasi asing akan berpengaruh langsung terhadap penyediaan lapangan kerja, dimana angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi yaitu di atas 8 % . Tinggi rendahnya angka pengangguran sering menjadi indikator keberhasilan sebuah perekonomian jika pembangunan perekonimian tersebut dianggap berhasil salah satunya bisa dilihat dari angka pengangguran yang rendah demikian pula sebaliknya. Tenaga kerja adalah salah satu factor produksi oleh karena itu perlu ada kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat netral dalam arti tidak berpihak pada pengusaha dan menekan buruh juga tidak berpihak pada buruh dengan merugikan pengusaha. Permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha adalah proses perijinan yang berbelit- belit dan membutuhkan biaya dan waktu yang lama, oleh karena itu perlu dibangun kesatuan komitmen dari pemerintah pusat hingga daerah untuk pro investasi untuk mendorong pembangunan daerahnya. Sebagai langkah awal perlu pemerintah melakukan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundangan termasuk peraturan- peraturan daerah yang bersifat kontra produktif. Satu langkah yang cukup baik, dimana beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa pengusaha tidak perlu melakukan perpanjangan ijin HO, tentu saja kebijakan tersebut harus direspon oleh pemerintah daerah secara baik namun tampaknya reaksi daerah sangat beragam. Jika pemerintah daerah melihat pada jangka panjang yaitu efeknya terhadap pembangunan ekonomi daerah tentu saja akan menyambut baik kebijakan tersebut, namun jika pemerintah daerah melihat pada jangka pendek dimana dengan tidak perlunya perpanjangan ijin HO akan mengurangi pendapatan daerah karena HO merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Tinggi rendahnya angka pengangguran tergantung pula ukuran yang dipakai oleh pemerintah untuk mendefinisikan pengaguran, secara teoritik pengangguran tidak sama dengan orang yang tidak bekerja, yang disebut dengan pengangguran adalah penduduk usia kerja yang ingin bekerja dan belum mendapat pekerjaan ( Pratama Raharja:2008:329). Karena masalah pengangguran adalah masalah yang komplek dalam arti banyak faktor yang menyebabkan pengangguran demikian pula implikasinya juga bersifat multi sektor, misalnya akan berimplikasi pada kemiskinan, daya beli, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya baik yang bersifat ekonomi maupun sosial oleh karena itu untuk mengurangi angka pengangguran perlu pemetaan yang jelas atas jenis pengangguran di Indonesia. Apakah pengaguran kita lebih banyak pada pengangguran siklis, musiman, friksional ataukan pengangguran structural, dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih tepat karena departemen yang terkait juga akan berbeda tergantung dari jenis pengaguran yang ada. Misalnya pada jenis pengagguran struktural dimana pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang tersedia, oleh karena itu kebijakan ketenagakerjaan yang diambil oleh pemerintah terintegrasi dengan departemen yang bertugas menyediakan tenaga kerja yaitu Departemen Pendidikan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tingkat pengaguran yang tinggi di Indonesian melalui kebijakan eksport tenaga kerja merupakan kebijakan jang bersifat instant seperti halnya kebijakan import beras karena permintaan beras dalam negeri tidak dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri, untuk eksport TKI dilakukan kerena permintaan pasar tenaga kerja dalam negeri lebih kecil dari penawaran tenaga kerja. Fenomena import beras dan eksport tenaga kerja menunjukkan kerapuhan sistem perekonomian kita dalam mensejahterakan rakyatnya dengan berbasis pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekspor- import tersebut adalah kebijakan yang dilematis dan bersifat jangka pendek, dalam arti untuk jangka pendek kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan yaitu kebutuhan pangan dan lapangan kerja tapi pada sisi lain akan dengan import beras akan menekan harga jual hasil pertanian sehingga adanya kenaikan harga beras tidak akan menambah kesejahteraan petani, kebijakan eksport tenaga kerja banyak memberikan efek negative jika tidak ada bingkai hukum yang jelas antara negara Indonesia dengan negara penampung dan hak- hak pekerja sering terlanggar hingga banyak kasus TKI yang tidak diselesaikan secara hukum.

Pemerintah hanya melihat tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan semula dan dianggap pembangunan ekonomi kita berhasil untuk mensejahterakan rakyat dengan melihat angka Produk Domestik Bruto, pendapatan perkapita namun tidak melihat bagaimana tingginya angka pertumbuhan ekonomi tersebut di nikmati oleh rakyat atau bagaimana tingkat distribusi pendapatan terjadi tersebut di dalam masyarakat. Dari ketiga pasangan calon presiden yang ikut dalam kompetisi pada pemilu beberapa waktu yang lalu semuanya mengangkat issu pertumbuhan ekonomi walaupun target yang mereka janjikan sangat bervariasi ada yang berani mematok angka pertumbuhan sampai 12 persen, 10 persen bahkan SBY hanya berani pada tingkatan angka 7. Tetapi tidak ada seorang calonpun yang mengangkat bagaimana angka pertumbuhan yang mereka janjikan akan didistribusikan dalam masyarakat supaya kesenjangan pendapatan tidak melebar seperti sekarang. Terlepas dari baik buruknya pemerintah Orde Baru, kita patut berkaca pada konsep- konsep pembangunan yang dipakai oleh Soeharto yaitu konsep Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan keamanan dimana tiga konsep tersebut menjadi pilar dalam melakukan pembangunan ekonomi.

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sehingga jumlah keluarga miskin menjadi semakin kecil. Kemiskinan adalah akibat dari kegagalan pembangunan ekonomi dan kegiatan ekonomi yang menyebabkan angka kemiskinan bersifat sangat dinamis yaitu kurun waktu tertentu angka kemiskinan bisa menjadi berlipat misalnya pada saat terjadi krisis keuangan global yang melanda Amerika beberapa waktu yang lalu akan berpengaruh pada banyak Negara termasuk Indonesia yaitu terjadi penambahan angka pengangguran akibat penurunan permintaan dan produksi serta jumlah keluarga miskin juga terjadi pelipatan, pada awal tahun 2008 dengan terjadinya kenaikan harga bahan makan yaitu beras dan kedelai hampir seratus persen maka tingkat kemiskinanpun juga menjadi semakin besar. Untuk itu perlu kebijakan yang bersifat komprehensif untuk menekan angka kemiskinan dengan melihat faktor penyebab dari kemiskinan tersebut. Kebijakan pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin yang sering dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan bahkan dengan adanya bantuan tunai dari pemerintah akan menambah jumlah keluarga miskin karena keluarga yang tidak miskinpun demi mendapat uang tiga ratus ribu rupiah akan mengaku sebagai keluarga miskin. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang sangat berat untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan memerlukan dukungan dari masyarakat karena tidak semua kemiskinan dapat diatasi oleh pemerintah. Misalnya untuk jenis kemiskinan kultural yang disebabkan oleh faktor budaya ataupun faktor sosial maka peran atau partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam rangka untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Namun jika jenis kemiskinanya adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan sebagai akibat atau korban dari struktur, maka peran penuh dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah keluarga miskin.

Dalam pembangunan infrastruktur juga sering mengalami hambatan terutama dalam penyediaan tanahnya, pada satu sisi masyarakat kurang memahami fungsi social atas tanah , sementara pemerintah sering hanya menggunakan pendekatan dari aspek hukum saja dan pendekatan lain agak diabaikan seperti pendekatan kemanusiaan maupun pendekatan kesejahteraan sehingga kondisi ini justru berpotensi munculnya konflik pertanahan. Permasalahan lain berkait dengan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur adalah Rencana Tata Ruang yang dimiliki oleh masing- masing daerah tidak tersusun secara baik sesuai dengan UU tata Ruang dan tidak sesuai dengan kemampuan dan potensi lahan, sementara Rencana Tata Ruang merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyediakan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Berdasar Perpres no 36 tahun 2005 tentang penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang kemudian dirubah dengan Perpres nomor 65 tahun 2006 penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur umum dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak secara sepihak apabila tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat pemilik tanah sepanjang penggunaan tanah tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada wilayah tersebut. Karena rencana tata ruang yang ada tidak tersusun secara baik maka dalam penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini juga sering bertentangan dengan Rencana Tata Ruang. Dimana dalam penyusunan Rencana Tata Ruang harus berpegang pada prinsip- prinsip dalam penyusunan Rencana Tata Ruang diantaranya prinsip kesesuaiannya dengan kemampuan tanah ( Yuniarso Ridwan: 2008: 16)

Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih memahami permasalahan di daerah dan punya komitmen yang tinggi untuk melakukan pembangunan daerah terutama pembangunan ekonomi yang dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan otonomi daerah diharapkan pula penyediaan infrastruktur menjadi lebih baik dalam rangka menunjang kegiatan investasi di daerah, namun disinyalir justru dengan otonomi daerah kualitas infrastruktur di daerah terjadi penurunan. Hal ini karena alokasi belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsungdibandingkan untuk belanja langsung.

**PENUTUP**

Apapun program pembangunan yang dilontarkan oleh pemerintah baik program seratus hari, program tahunan maupun jangka menengah dan panjang rakyat berharap segera terwujudnya program- program tersebut secara baik dan rakyat benar- benar menggantungkan harapannya pada realisasi program yang akan meningkatkan kesejahteraannya, pada sisi lain terealisasinya program kerja sekaligus merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai konsekuensi dari janji- janji politik yang mereka sampaikan untuk menarik simpati rakyat pada saat kampanye. Banyak tahapan ujian bagi pemerintah untuk pengukur kinerja pemerintah mulai dari evaluasi seratus hari pertama sampai dengan evaluasi lima tahun pada saat akhir jabatan.

**Daftar Pustaka**

Arifin,Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian*,Jakarta, Kompas Media, 2004

Raharja,Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, 2008

Ridwan, Juniarso, *Hukum Tata Ruang*, Bandung, Nuansa,2008.

Perpres no 36 tahun 2005 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Kompas,Jakarta, 10 November 2009.

Kompas, Jakarta, 9 Desember 2009.

Kompas, Jakarta, 14 Desember 2009.